

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

PENGUMUMAN

Nomor : 210/02278

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan ketentuan pada pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

Pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5419/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 13 Agustus 2024 Perihal : Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

II. JUMLAH KEBUTUHAN PNS

Jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebanyak 147 formasi.

III. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI KEBUTUHAN, DAN UNIT PENEMPATAN PNS

Berikut adalah rincian kebutuhan jabatan PNS yang akan diisi melalui pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis kebutuhan PNS meliputi umum dan khusus.
2. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus adalah:
 - a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude;
 - b. Penyandang Disabilitas.
3. Kriteria pelamar umum adalah pelamar yang berasal dari umum.

Tabel 1
Rincian Kebutuhan PNS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH KESELURUHAN		147		
A.	FORMASI KHUSUS LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT “DENGAN PUJIAN”/CUMLAUDE		5		
1	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERTAMA AHLI	S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UPTD PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
2	AUDITOR PERTAMA AHLI	S-1 ADMINISTRASI BISNIS; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 MANAJEMEN; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN INSPEKTORAT KABUPATEN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
3	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PERTAMA AHLI	S-1 PSIKOLOGI; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI; S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG USAHA MIKRO	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
5	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 HUKUM; S-1 ILMU POLITIK; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN INSPEKTORAT KABUPATEN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI DAN REFORMASI BIROKRASI	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
B.	FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS		3		
1	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN; D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
2	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA PUBLIK; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN BAGIAN TATA USAHA	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
3	KONSELOR SDM	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING; S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
C.	FORMASI UMUM		139		
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 PARIWISATA; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PARIWISATA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
2	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN; S-1 EKONOMI; S-1 PLANOLOGI; S-1 GEOGRAFI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
3	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 SOSIOLOGI; S-1 ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK GEOLOGI; S-1 GEOGRAFI; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
4	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 SOSIOLOGI; S-1 ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK GEOLOGI; S-1 GEOGRAFI; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
5	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN KETAHANAN NASIONAL	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1	2	3	4	5	6
6	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
7	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 SOSIOLOGI; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
9	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BIDANG PEMBINAAN OLAHRAGA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
10	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG PERBENDAHARAAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
11	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 DESAIN PRODUK; S-1 EKONOMI; S-1 STATISTIKA; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PENGELOLAAN FASILITAS PERDAGANGAN TRADISIONAL	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
12	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 DESAIN PRODUK; S-1 EKONOMI; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 STATISTIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG USAHA PERDAGANGAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
13	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
14	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
15	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1	2	3	4	5	6
16	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
17	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
18	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
19	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV STUDI KEBIJAKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
20	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS TENAGA KERJA SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
21	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
22	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
23	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
24	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1	2	3	4	5	6
25	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) SEKRETARIAT	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
26	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN DIGITAL; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
27	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN DIGITAL; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
28	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN DIGITAL; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS TENAGA KERJA SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
29	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN DIGITAL; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
30	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BIDANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
31	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
32	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
33	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
34	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN; D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1	2	3	4	5	6
35	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
36	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UPTD PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
37	ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL	D-III PERPUSTAKAAN, INFORMASI, DAN KEARSIPAN; D-III PERPUSTAKAAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BIDANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
38	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 MANAJEMEN; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN INSPEKTORAT KABUPATEN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
39	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 HUKUM; S-1 MANAJEMEN; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN INSPEKTORAT KABUPATEN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
40	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; D-IV AKUNTANSI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 HUKUM; S-1 MANAJEMEN; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN INSPEKTORAT KABUPATEN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI DAN REFORMASI BIROKRASI	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
41	AUDITOR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN KEUANGAN; D-III STATISTIKA; D-III TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN INSPEKTORAT KABUPATEN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
42	AUDITOR TERAMPIL	D-III STATISTIKA; D-III TEKNIK SIPIL; D-III MANAJEMEN KEUANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN INSPEKTORAT KABUPATEN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
43	AUDITOR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN KEUANGAN; D-III STATISTIKA; D-III TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN INSPEKTORAT KABUPATEN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
44	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PUBLIK; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN PERSIDANGAN	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1	2	3	4	5	6
45	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	D-IV BISNIS JASA MAKANAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS TENAGA KERJA BALAI LATIHAN KERJA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
46	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN MODE	2	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS TENAGA KERJA BALAI LATIHAN KERJA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
47	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS	2	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS TENAGA KERJA BALAI LATIHAN KERJA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
48	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
49	KURATOR	S-1 ANTROPOLOGI; S-1 ARKEOLOGI; S-1 ILMU SEJARAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) UPTD MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
50	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
51	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI; S-1 SEJARAH; S-1 ARKEOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) BIDANG SEJARAH, BAHASA, SASTRA, DAN PERMUSEUMAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
52	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
53	PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA	S-1 KRIYA; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
54	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 AKUAKULTUR; S-1 PERIKANAN; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN; S-1 PERIKANAN ILMU KELAUTAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN BIDANG PERIKANAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
55	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
56	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1	2	3	4	5	6
57	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KABUPATEN KALASAN KABUPATEN KAPANEWON KALASAN JAWATAN PRAJA KAPANEWON KALASAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
58	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KABUPATEN KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN KAPANEWON MOYUDAN JAWATAN PRAJA KAPANEWON MOYUDAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
59	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KABUPATEN KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN KAPANEWON PRAMBANAN JAWATAN PRAJA KAPANEWON PRAMBANAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
60	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KABUPATEN KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN KAPANEWON SLEMAN JAWATAN PRAJA KAPANEWON SLEMAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
61	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KABUPATEN KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN KAPANEWON NGAGLIK JAWATAN PRAJA KAPANEWON NGAGLIK	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
62	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KABUPATEN KAPANEWON DEPOK KABUPATEN KAPANEWON DEPOK JAWATAN PRAJA KAPANEWON DEPOK	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
63	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KABUPATEN KAPANEWON PAKEM KABUPATEN KAPANEWON PAKEM JAWATAN PRAJA KAPANEWON PAKEM	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
64	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KABUPATEN KAPANEWON TURI KABUPATEN KAPANEWON TURI JAWATAN PRAJA KAPANEWON TURI	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
65	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KABUPATEN KAPANEWON GODEAN KABUPATEN KAPANEWON GODEAN JAWATAN PRAJA KAPANEWON GODEAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
66	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 MANAJEMEN; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 STATISTIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
67	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU SOSIOLOGI; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 KEPENDUDUKAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
68	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL; S-1 SOSIOLOGI; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1	2	3	4	5	6
69	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SUBBAGIAN PROTOKOL	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
70	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN BENCANA; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 SOSIOLOGI; S-1 ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK GEOLOGI; S-1 GEOGRAFI; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
71	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN BENCANA; S-1 SOSIOLOGI; S-1 ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK GEOLOGI; S-1 GEOGRAFI; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
72	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 HUKUM; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
73	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR; S-1 PLANOLOGI; S-1 GEOGRAFI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; D-IV TEKNIK GEODESI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) BIDANG PERTANAHAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
74	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 PLANOLOGI; S-1 GEOGRAFI; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; D-IV TEKNIK GEODESI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
75	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR; S-1 PLANOLOGI; S-1 GEOGRAFI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; D-IV TEKNIK GEODESI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) BIDANG TATA RUANG	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
76	PENERA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK FISIKA; S-1 STATISTIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD PELAYANAN METROLOGI LEGAL	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
77	PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 FISIKA; S-1 TEKNIK ELEKTRO; S-1 MATEMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD PELAYANAN METROLOGI LEGAL	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
78	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 GEOGRAFI; S-1 ILMU GEOGRAFI; S-1 TEKNIK KIMIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1	2	3	4	5	6
79	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU POLITIK	3	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN INSPEKTORAT KABUPATEN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
80	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU POLITIK; S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN INSPEKTORAT KABUPATEN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
81	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU POLITIK	3	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN INSPEKTORAT KABUPATEN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
82	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU INFORMASTIKA; S-1 ILMU POLITIK; S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN INSPEKTORAT KABUPATEN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI DAN REFORMASI BIROKRASI	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
83	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III KOMUNIKASI MASSA; D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III ADMINISTRASI PUBLIK; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SUBBAGIAN PROTOKOL	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
84	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III BUDIDAYA PERIKANAN; D-III PERIKANAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN BIDANG PERIKANAN	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
85	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III MANAJEMEN; D-III ADMINISTRASI PUBLIK; D-III PEMBANGUNAN SOSIAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
86	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI; S-1 TEKNIK INDUSTRI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG USAHA MIKRO	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
87	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL; S-1 SOSIOLOGI; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 PSIKOLOGI; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
88	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 KRIYA; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1	2	3	4	5	6
89	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL; S-1 SOSIOLOGI; D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN SOSIAL	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
90	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
91	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
92	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
93	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
94	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
95	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
96	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) SEKRETARIAT	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
97	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
98	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
99	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 EKONOMI; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1	2	3	4	5	6
100	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
101	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU POLITIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
102	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
103	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT; D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI; D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
104	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFROMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KESEHATAN BIDANG SUMBERDAYA KESEHATAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
105	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG SARANA PELAYANAN KESEHATAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
106	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
107	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA PUBLIK; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
108	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA PUBLIK; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
109	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA PUBLIK; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN BAGIAN TATA USAHA	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
110	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III NABAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; D-III ADMINISTRASI PUBLIK; D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	RENTANG GAJI (Rp)
1	2	3	4	5	6
111	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA PUBLIK; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
112	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
113	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
114	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG MUTASI	Rp2.500.000,00 s.d. Rp3.000.000,00
115	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEOLOGI; S-1 TEKNIK GEODESI; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) BIDANG TATA RUANG	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
116	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	S-1 GEOGRAFI; S-1 TEKNIK GEOLOGI; S-1 TEKNIK GEODESI; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00
117	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEOLOGI; S-1 TEKNIK GEODESI; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) BIDANG PERTANAHAN	Rp3.000.000,00 s.d. Rp3.500.000,00

Tabel 2
Deskripsi Umum Jabatan

NO	JABATAN	DESKRIPSI UMUM JABATAN
1	Adyatama Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	Memelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif (Peraturan MENPAN-RB No. 11 Tahun 2021)
2	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (Peraturan MENPAN-RB No. 17 Tahun 2019)
3	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	Melaksanakan analisis kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (Peraturan MENPAN-RB No. 87 Tahun 2020)
4	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan (Peraturan MENPAN-RB No. 45 Tahun 2013)
5	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama	Melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah (Peraturan MENPAN-RB No. 42 Tahun 2014)

NO	JABATAN	DESKRIPSI UMUM JABATAN
6	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	Melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, pengelolaan perizinan dan nonperizinan perdagangan, pengelolaan ekspor dan impor, pengendalian harga dan pengelolaan distribusi, pemberdayaan konsumen, pengembangan promosi perdagangan, pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen. (Peraturan MENPAN-RB No. 68 Tahun 2020)
7	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir (Peraturan MENPAN-RB No. 37 Tahun 2020)
8	Arsiparis Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi (Peraturan MENPAN-RB No. 48 Tahun 2014)
9	Arsiparis Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi (Peraturan MENPAN-RB No. 48 Tahun 2014)
10	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur (Peraturan MENPAN-RB No. 39 Tahun 2020)
11	Asisten Perpustakaan Terampil	Melaksanakan kegiatan teknis administratif dalam operasional perpustakaan (Peraturan MENPAN-RB No. 56 Tahun 2022)
12	Auditor Ahli Pertama	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi (Peraturan MENPAN-RB No. 48 Tahun 2022)
13	Auditor Terampil	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi (Peraturan MENPAN-RB No. 48 Tahun 2022)
14	Dokumentalis Hukum	Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum yang meliputi analisis konteks dan isi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum dan pengembangan sistem dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar (Keputusan MENPAN-RB No. 11 Tahun 2024)
15	Instruktur Ahli Pertama	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan pelatihan kerja (Peraturan MENPAN-RB No. 82 Tahun 2020)
16	Konselor SDM	Memberikan layanan bimbingan dan konseling (Keputusan MENPAN-RB No. 11 Tahun 2024)
17	Kurator	Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita, tata pameran di museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yang berlaku (Keputusan MENPAN-RB No. 11 Tahun 2024)
18	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Peraturan MENPAN-RB No. 83 Tahun 2020)
19	Pamong Budaya Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya (Peraturan MENPAN-RB No. 7 Tahun 2020)
20	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut (Peraturan MENPAN-RB No. 33 Tahun 2020)
21	Pembina Industri Ahli Pertama	Melakukan pembinaan industri (Peraturan MENPAN-RB No. 28 Tahun 2022)
22	Penata Kelola Kelautan Dan Perikanan	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan (Keputusan MENPAN-RB No. 11 Tahun 2024)
23	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses perubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/atau keluarga korban (Keputusan MENPAN-RB No. 11 Tahun 2024)
24	Penata Kelola Pemerintahan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan Instansi Pemerintah (Keputusan MENPAN-RB No. 11 Tahun 2024)
25	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan tata kelola penanaman modal (Peraturan MENPAN-RB No. 51 Tahun 2020)
26	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (Peraturan MENPAN-RB No. 81 Tahun 2020)
27	Penata Keprotokolan	Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan Instansi Pemerintah (Keputusan MENPAN-RB No. 11 Tahun 2024)
28	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Peraturan MENPAN-RB No. 88 Tahun 2020)
29	Penata Perizinan Ahli Pertama	Melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan (Peraturan MENPAN-RB No. 22 Tahun 2022)

NO	JABATAN	DESKRIPSI UMUM JABATAN
30	Penata Ruang Ahli Pertama	Melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang (Peraturan MENPAN-RB No. 78 Tahun 2020)
31	Penera Ahli Pertama	Melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya), pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan cap tanda tera (Peraturan MENPAN-RB No. 32 Tahun 2014)
32	Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama	Melakukan pengawasan metrologi legal meliputi pengawasan UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya), pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan metrologi legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian pengaduan masyarakat (Peraturan MENPAN-RB No. 35 Tahun 2014)
33	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup (Peraturan MENPAN-RB No. 22 Tahun 2019)
34	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reuiu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan (Peraturan MENPAN-RB No. 36 Tahun 2020)
35	Pengelola Keprotokolan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan Instansi Pemerintah (Keputusan MENPAN-RB No. 11 Tahun 2024)
36	Pengelola Layanan Kelautan Dan Perikanan	Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan (Keputusan MENPAN-RB No. 11 Tahun 2024)
37	Pengelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Keputusan MENPAN-RB No. 11 Tahun 2024)
38	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Melakukan pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan pemetaan data dan analisis usaha, konsultasi bisnis dan pendampingan, pengembangan teknologi informasi usaha dan inkubasi wirausaha, pengembangan pembiayaan wirausaha, dan pengembangan ekosistem bisnis (Peraturan MENPAN-RB No. 43 Tahun 2022)
39	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan (Peraturan MENPAN-RB No. 28 Tahun 2018)
40	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Pertama	Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan (Peraturan MENPAN-RB No. 24 Tahun 2021)
41	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial (Peraturan MENPAN-RB No. PER/06/M.PAN/4/2008)
42	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Keputusan MENPAN-RB No. 11 Tahun 2024)
43	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya (Peraturan MENPAN-RB No. 65 Tahun 2021)
44	Perencana Ahli Pertama	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Peraturan MENPAN-RB No. 4 Tahun 2020)
45	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Peraturan MENPAN-RB No. 4 Tahun 2014)
46	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan (Peraturan MENPAN-RB No. 6 Tahun 2014)
47	Pranata Komputer Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan teknologi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia (Peraturan MENPAN-RB No. 32 Tahun 2020)
48	Pranata Komputer Terampil	Melaksanakan kegiatan teknologi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia (Peraturan MENPAN-RB No. 32 Tahun 2020)
49	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara (Peraturan MENPAN-RB No. 38 Tahun 2020)
50	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial (Peraturan MENPAN-RB No. 27 Tahun 2020)

IV. KETENTUAN UMUM

Pelamar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dengan melampirkan surat persetujuan dari PPK atau PyB;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
11. Untuk pelamar PNS merupakan lulusan Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV), atau lulusan Diploma III (D-III) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol).
12. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN, 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
13. Bersedia ditempatkan pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan tidak mengajukan pindah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.

V. KETENTUAN KHUSUS

- a. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas
 1. Pelamar yang berasal dari **penyandang disabilitas** dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 2. Pada saat melamar di SSCASN pelamar **penyandang disabilitas** wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan:
 - a) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 865405, Faksimile (0274) 868945
Laman: www.slemankab.go.id, Surel: pemdaslleman@slemankab.go.id

- b) menyampaikan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Dalam hal pelamar penyandang disabilitas **tidak melampirkan** dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, serta **tidak melampirkan** *link* video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah hasil akhir seleksi, pelamar **dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dibatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.**
- b. Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude
1. Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang Pendidikan paling rendah Sarjana, tidak termasuk Diploma Empat;
 2. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 3. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “Dengan Pujian”/Cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- c. Pelamar dapat menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
 2. Melamar pada jenjang Pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
 3. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 4. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 5. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
 6. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024;
 7. Pelamar memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024; dan
 8. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun 2024.

VI. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah *)
2. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Bupati Sleman dan dibubuhi *e-materai* Rp10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam*) (format terlampir pada tautan <https://s.id/CASN24>)
3. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang diketik menggunakan komputer dan dibubuhi *e-materai* Rp10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam*) (format terlampir)
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) *)
5. Ijazah ASLI atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan *), **surat keterangan lulus tidak berlaku**;
6. Transkrip nilai ASLI atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) *)
7. Sertifikat atau tangkapan layar (*screenshot*) pada PDDIKTI/BAN-PT dari Akreditasi program studi/perguruan tinggi pada saat kelulusan yang tertulis pada ijazah *);
8. a) Bagi penyandang disabilitas :
 1. Dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 2. *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- b) Bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude :
 1. Merupakan lulusan Sarjana (S-1) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol);
 2. Sertifikat atau tangkapan layar (*screenshot*) pada PDDIKTI/BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi berakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 3. Sertifikat atau tangkapan layar (*screenshot*) pada PDDIKTI/BAN-PT dari Akreditasi program studi berakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang tertulis pada ijazah.

keterangan :

Tanda *) menandakan dokumen **WAJIB**.

VII. KETENTUAN SCAN DOKUMEN

Semua dokumen pada romawi **VI. Dokumen Persyaratan** discan dengan ketentuan :

1. Format dan ukuran file sesuai dengan ketentuan dari aplikasi SSCASN;
2. Dokumen yang discan merupakan dokumen asli bukan dokumen yang dilegalisir maupun hasil fotocopy;

3. Seting scanner dimode berwarna, bukan *grayscale*;
4. Dokumen terbaca jelas;
5. Dalam hal dokumen tidak asli (*fotocopy* dan/atau legalisir discan)/ dokumen tidak terbaca/ dokumen tidak lengkap/ dokumen tidak sesuai ketentuan, panitia seleksi dapat menyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

VIII. JADWAL SELEKSI

Tabel 3
Jadwal Seleksi Pengadaan PNS

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

*** JADWAL DAPAT BERUBAH MENYESUAIKAN KEBIJAKAN DARI PANSELNAS**

IX. PENDAFTARAN

1. Daftar Akun
 - a. Pelamar mengakses portal SSCASN melalui <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b. Buat akun SSCASN
 - c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat
 - d. Lengkapi biodata dan unggah swafoto
2. Daftar Formasi
 - a. Pilih jenis seleksi
 - b. Pilih formasi
 - c. Unggah dokumen (file scan asli dokumen dengan jenis dan ukuran file sesuai ketentuan pada SSCASN)
 - d. Cek resume dan akhiri pendaftaran
 - e. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun
3. Pelamar dapat mengikuti seleksi kompetensi apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Tata cara pendaftaran mengikuti ketentuan/alur proses dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id>.

X. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi Administrasi dilakukan terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus;
2. Pelaksanaan seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda).

XI. SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP);
2. Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud angka 1 dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* milik Badan Kepegawaian Negara;

XII. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan;
2. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD mengikuti SKB;
3. Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud angka 1 dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* milik Badan Kepegawaian Negara;

XIII. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian peserta;
3. Pemerintah Kabupaten Sleman tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan **Tim Pengadaan ASN Tahun 2024**, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai ASN Tahun 2024;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Untuk mengikuti seluruh seleksi **ASN Tahun 2024**, para pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
6. Keputusan Tim Panitia Seleksi **ASN Tahun 2024** tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab peserta.
8. Layanan informasi pelaksanaan seleksi ASN Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024, melalui :
 - a. Website : - <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id>
- <https://slemankab.go.id>
- <https://bkpp.slemankab.go.id>
 - b. E-mail pengadaan ASN Kabupaten Sleman : pengadaan.asnsleman@gmail.com

Sleman, 19 Agustus 2024
a.n. Bupati Sleman
Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi
Daerah Pengadaan ASN



[Signature]
Drs. Susmiarto, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196605271993031003

FORMAT SURAT LAMARAN (PELAMAR CPNS)

.....,..... 2024

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Lamaran CPNS

Kepada Yth.
Bupati Sleman

di Sleman

Dengan hormat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **XXXXXXXXXXXX**
Tempat,tanggal lahir : **XXXXXXXXXXXX**
Pendidikan / Jurusan : **XXXXXXXXXXXX**
Alamat : **XXXXXXXXXXXX**
Nomor telepon : **XXXXXXXXXXXX**

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ibu, dengan harapan dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman pada jabatan **XXXXXXXXXXXX**. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas lamaran dengan lampiran sebagai berikut :

1. Scan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Surat Keterangan Pengganti KTP
2. Scan asli Pas Foto
3. Scan asli Ijazah
4. Scan asli Transkrip Nilai Akademik
5. Scan asli Surat Pernyataan
6. Scan/tangkap layar akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Prodi (jika dalam ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasi)
7. *Surat keterangan dokter dari dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat dan derajat disabilitas (**khusus** bagi pelamar penyandang disabilitas)*
8. *Video Singkat keseharian (**khusus** bagi pelamar penyandang disabilitas)*

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

e-materai

10.000

Hormat saya,

ttd

Nama pelamar

FORMAT SURAT PERNYATAAN (PELAMAR CPNS)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **XXXXXXXXXXXX**
Tempat,tanggal lahir : **XXXXXXXXXXXX**
No. KTP : **XXXXXXXXXXXX**
Alamat : **XXXXXXXXXXXX**

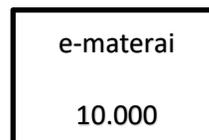
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Hormat saya,



ttd

Nama pelamar